

Ikhtisar Webinar Nasional  
**Menakar Keberpihakan  
Pemerintah terhadap  
Perempuan: Komitmen  
Etik atau Gimik Politik?**



## **Menakar Keberpihakan Pemerintah terhadap Perempuan:**

### **Komitmen Etik atau Gimik Politik?**

6 Maret 2025 | 09:00–11:30

*Webinar* Nasional bertajuk “Menakar Keberpihakan Pemerintah terhadap Perempuan: Komitmen Etik atau Gimik Politik?” digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2025. *Webinar* ini menghadirkan tiga narasumber, yakni (1) Ratu Dyah Ayu Gendiswardani, Analis Utama Maha Data dan Gender Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45); (2) Mike Verawati Tangka, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia; (3) Salsabila Putri Pertiwi, Redaktur Konde.co; serta dimoderatori oleh Aldi Pahala Rizky, Analis Maha Data dan Gender LAB 45. Para narasumber mengevaluasi kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo terhadap isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Evaluasi ini terutama berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan, politik, dan ekonomi.

*Webinar* dibuka dengan sesi *Keynote Speech* oleh Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45, yang menyampaikan urgensi kesetaraan gender. Jaleswari menyoroti Deklarasi Beijing sebagai komitmen global untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang dihadiri banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia telah melakukan beberapa capaian dalam mewujudkan Deklarasi Beijing, seperti upaya pembangunan inklusif, program keluarga harapan, pengesahan dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan capaian 22% dari kuota 30% representasi politik perempuan di parlemen. Terlepas dari upaya tersebut, Jaleswari menyatakan bahwa jalan menuju kesetaraan gender masih berliku di tengah krisis yang melanda dunia, diskriminasi dan ketidakadilan yang mengakar kuat, dan demokrasi seolah kehilangan arahnya. Meminjam kutipan dari Audrey Lorde yang menyatakan bahwa “keheninganmu tidak akan melindungimu,” Jaleswari mengajak masyarakat untuk tetap bersuara. Hari Perempuan Internasional menjadi momentum untuk menuntut kebijakan yang berpihak pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat, tanpa terkecuali perempuan kelompok minoritas, perempuan penyandang disabilitas, perempuan pekerja migran, perempuan pekerja rumah tangga, hingga perempuan di garis perbatasan. Semua berhak atas hak yang sama, yakni perlindungan dari segala bentuk penindasan, jaminan akses pada pendidikan dan kesehatan yang layak, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Harapannya, *webinar* ini dapat menjadi medium berjejaring dan perjuangan atas kebijakan yang adil dan inklusif di Indonesia.

## Domestikasi Perempuan dalam Kebijakan

Mike Verawati Tangka meninjau kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo dan proyeksi mengatasi ketimpangan pembangunan berbasis gender. Terdapat satu poin dari delapan Asta Cita yang menyebut perempuan dan kesetaraan gender, yaitu poin keempat. Poin ini mencakup berbagai aspek, seperti memperkuat SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Mike mengatakan bahwa permasalahan sains dan energi terbarukan sulit terlihat pada perempuan karena mereka dianggap jauh dari bidang tersebut. Kurangnya representasi perempuan di STEM menunjukkan bahwa kebijakan di bidang infrastruktur, pertahanan, ekonomi, dan lainnya sering kali mengabaikan perempuan. Selain itu, perempuan memiliki peran yang beragam, mulai dari nelayan, petani, pekerja, hingga perempuan adat. Semua perempuan merupakan wajah pembangunan dan tidak bisa dilihat hanya dari sisi biologis atau konstruksi gender yang sering dihubungkan dengan peran domestik.

Oleh karena itu, Mike mengajak peserta *webinar* untuk mengulik kembali bagaimana posisi isu gender dalam agenda politik. Isu gender kerap dibentuk demi kepentingan mendulang suara, tidak benar-benar meninjau posisi dan persoalan perempuan ketika mereka diharapkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang notabenehnya termasuk ke dalam politik praktis. Isu gender juga masih dipandang dari paradigma domestik yang lekat persepsinya dengan kesehatan, perawatan, kesejahteraan, keluarga, dan pengasuhan. Perempuan sekadar dipandang dari lensa *gender neutral mindset*, dengan anggapan permasalahan ketimpangan gender dapat diselesaikan oleh konsep makro. Padahal pengalaman serta kebutuhan perempuan jauh berbeda dengan laki-laki. Hal tersebut merupakan produk dari konstruksi sosial. Pemahaman yang keliru mengenai gender direduksi sebagai isu perempuan semata justru menampik pengalaman perempuan yang interseksional.

Mike juga menerangkan dasar pertimbangan kuat sebagai pembuktian bahwa usaha perempuan tidak berangkat dari titik nol, tetapi sudah menjalani perjuangan dalam agenda politik sejak lama. Preseden dari landasan tersebut berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020–2024, poin kelima dari Pemenuhan *Sustainable Development Goals* (SDG's), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender, Manusia, dan Kesehatan, hingga komitmen global seperti Beijing Platform 25+, G20 Summit, UN Global Impact, *Paris Agreement*, dan lainnya.

Sayangnya, ketika merumuskan program, pemerintah di Indonesia masih mengimplementasikan *Practical Gender Interest*, yakni gagasan yang berfokus pada taraf penyelesaian hal-hal teknis seperti kebutuhan dasar, *charity*, dan bantuan sosial. Belum terlihat agenda atau program yang menggunakan kerangka strategis dalam upaya memunculkan agensi, kemandirian, dan pemberdayaan perempuan.

Ihwal tersebut tecermin pada program-program pemerintahan Prabowo, seperti Makan Besar Gratis (MBG), minimnya representasi perempuan di kursi parlemen, fenomena PHK massal, hingga program efisiensi yang merugikan perempuan. Mike mempertanyakan apakah program MBG sejatinya berangkat dari kerangka GEDSI (*Gender Equality, Disability, Social Inclusion*) atau sekadar melihat satu aspek yang ingin diselesaikan secara instan, sehingga program MBG dianggap tidak inovatif dan reduksionis. Mike juga mengutarakan fenomena lain, seperti tidak ada satu pun anggota parlemen perempuan yang duduk dalam posisi pengambilan keputusan dalam komisi VIII DPR RI, kebijakan absurd seperti pengenaan PPN 12% dan fenomena Gas Melon, serta PHK Massal Sritex yang merugikan buruh perempuan. Selain itu, terdapat dinamika komunikasi publik pemerintah yang nir empati, seperti polemik implementasi program MBG—di mana banyak simpang siur informasi dan evaluasi terkait program MBG yang harus ditinjau ulang. Persoalan efisiensi juga tidak dibarengi dengan akuntabilitas ketika efisiensi itu memotong kebutuhan masyarakat. Semua program tersebut merupakan bukti dari lemahnya komitmen kesetaraan gender dan inklusi sosial pemerintahan Prabowo.

Terdapat pula tantangan-hambatan atas keberpihakan pemerintahan Prabowo terhadap isu gender yang dirasakan ketika berbicara soal kapasitas tim kerja, akuntabilitas pemerintah yang lemah, penyusunan rencana kerja yang tidak partisipatif, kebijakan efisiensi, dan penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Pada akhirnya, Mike memaparkan rekomendasi penguatan kesetaraan gender dan inklusi sosial demi mengatasi persoalan pragmatisme dan ruang gerak yang semakin terbatas. Mike mendorong untuk melakukan penataan ulang strategi konsolidasi masyarakat sipil, menyusun agenda pengorganisasian kelompok perempuan di tingkat akar rumput, menguatkan gerakan kelompok perempuan yang menghadapi tantangan, menguatkan kepemimpinan perempuan, mencetak “*Male Allies*”, serta menciptakan strategi keswadayaan. Secara keseluruhan, pemerintah memiliki komitmen yang kontraproduktif terhadap aksi afirmatif, belum ada upaya yang jelas terkait jaminan dan perlindungan sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan, hingga pendidikan perempuan.

## Tokenisme Keberpihakan Terhadap Perempuan

Sementara itu, Salsabila Putri Pertiwi juga mempertanyakan komitmen pemerintah yang tidak berpihak pada perempuan di sesi kedua *webinar*. Kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan isu perempuan dan gender sebagai tokenisme dan wacana saja. Pemerintah tidak merealisasikan program-program tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Salsabila mengkritik isu perempuan yang selalu dilekatkan dengan isu domestik. Sebaliknya, isu perempuan dan gender eksis di semua sektor.

Salsabila juga membagikan survei Konde.co atas evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo yang berkaitan dengan isu perempuan dan kelompok marjinal. Survei melibatkan 72 responden perempuan cis, trans, dan non-biner. Hasilnya mengungkap sekitar 79% responden tidak mengetahui isu perempuan yang sedang dijalankan pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama masih jauh dari harapan kelompok rentan. Melalui survei tersebut, diketahui bahwa representasi perempuan dalam kabinet dan legislatif masih minim, sejalan dengan ketiadaan isu perempuan dalam 100 hari pertama pemerintah Prabowo. Dari 46 jajaran menteri, hanya ada lima menteri perempuan dan delapan wakil menteri perempuan. Nyaris tidak ada yang membawa isu krusial perempuan dan lebih cenderung sekadar menjadi ‘simbol representatif’. Bahkan, Komisi VIII DPR RI pun diisi sepenuhnya oleh laki-laki. Selain itu, dalam survei tersebut juga terdapat kritik kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dalam merespons isu gender, perempuan dan, anak. Hal ini terbukti dari maraknya kekerasan seksual dan femisida yang tidak direspons secara tegas oleh pemerintah.

Secara spesifik, Salsabila juga mengangkat polemik pemangkasan dana pendidikan yang dikorbankan demi MBG. Kebijakan tersebut berimplikasi terhadap kenaikan UKT mahasiswa sehingga terancam tidak dapat melanjutkan studi, ketidakpastian tunjangan kinerja dosen yang membuat kualitas pengajaran dan penelitian terdampak, serta gaji guru honorer yang sudah minim semakin berkurang. Kepentingan MBG disinyalir mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama perempuan, untuk mengakses pendidikan yang layak. Salsabila memberikan contoh demonstrasi besar di Papua mengenai tuntutan dari siswa sekolah yang menuntut penghapusan MBG dan akses pendidikan layak. Ketika pemerintah tidak berorientasi kepada pendidikan, anak perempuan di daerah yang kesulitan untuk mengakses pendidikan

akan dipaksa untuk mengurus rumah tangga, atau bahkan semakin meningkatkan persentase pernikahan dini.

Efisiensi anggaran kesehatan juga memperlebar kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama bagi perempuan dan masyarakat di daerah terpencil. Berdasarkan hasil survei Konde.co, efisiensi berdampak terhadap layanan kesehatan gratis dan distribusi alat kontrasepsi. Terdapat seorang responden Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) honorer daerah terpencil yang menyebutkan bahwa selama hampir tiga bulan mereka tidak menerima distribusi alat kontrasepsi gratis. Padahal, angka pernikahan di bawah umur di daerahnya terbilang tinggi, sehingga pencegahan kehamilan semakin sulit. Pemangkasan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga berisiko memperlemah pengawasan terhadap obat-obatan dan kosmetik.

Salsabila menyerukan agar pemerintah tidak terus-menerus menyengsarakan perempuan dan kelompok marjinal, terutama dengan mengabaikan latar belakang interseksionalitas yang seharusnya menjadi perhatian dan prioritas. Pemerintah harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, karena kebutuhan perempuan tidak bisa disamaratakan. Kebijakan publik yang ada saat ini dibuat tanpa kajian mendalam dan minim partisipasi masyarakat, yang menyebabkan ketidakpastian serta memperburuk kondisi ekonomi dan sosial. Kebijakan PPN dan MBG paling berdampak pada perempuan, kelompok marjinal, dan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam akses kesehatan dan pendidikan. Salsabila menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengimplementasikan produk hukum yang berpihak pada perempuan, seperti UU TPKS, dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

### **Proyeksi Pengarusutamaan Gender Prabowo**

Pada pemaparan sesi ketiga *webinar*, Ratu Dyah Ayu Gendiswardani berupaya untuk membuktikan apakah keberpihakan pemerintahan Prabowo terhadap perempuan merupakan komitmen etik pada tiga sektor utama, yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Gendis juga membandingkan posisi pada awal pergantian pemerintahan, 100 hari Prabowo, serta proyeksi di tahun 2029 terkait komitmen pemerintahan terhadap pengarusutamaan gender (PUG). Gendis memulai pemaparannya dengan melihat posisi Indonesia dalam Global Gender Gap Index. Pada satu dekade terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan dan mengalami penurunan

ke peringkat 100, yang sebelumnya menempati posisi 87 dari 146 negara. Selain itu, Indonesia paling lemah pada pemberdayaan politik akibat representasi perempuan di kursi parlemen yang masih belum memenuhi kuota afirmasi 30%.

Pada sektor ekonomi, ketimpangan gender dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih tergolong tinggi. Tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya mencapai 53%. Apabila ditinjau melalui proposisi pekerjaan, kebanyakan perempuan bekerja di sektor informal, sedangkan laki-laki di sektor formal. Selanjutnya, ketimpangan gender dalam dimensi pasar tenaga kerja juga eksis melalui kesenjangan upah. Persentase kesenjangan upah laki dan perempuan masih tinggi, sejak tahun 2016 menunjukkan selisih yang masih stagnan pada level 20%. Sementara itu, tinjauan lebih jauh menunjukkan selisih antara upah rata-rata jam pekerja laki-laki dan perempuan mengalami pelebaran pada tahun 2022 dan 2023 hingga mencapai RP3.346/jam. Perempuan, yang bekerja di sektor informal, membutuhkan perlindungan yang layak karena lebih rentan dengan standar upah tidak menentu dan disrupsi ekonomi yang berlangsung.

Sementara itu, analisis data mengenai perempuan dan kesehatan menunjukkan proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan terus menurun sejak 2018. Angka perempuan yang melahirkan anak lahir hidup di bawah usia dua puluh tahun cenderung stabil dan sedikit menurun. Meskipun akses kesehatan sudah semakin membaik, kehamilan remaja menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintahan yang baru. Selain itu, pada Angka Kematian Bayi dan Ibu dari tahun 1970–2020 konsisten menurun. Berbeda dari tren yang ditunjukkan oleh sensus penduduk persepuluh tahun ini, kematian ibu dan bayi tahun 2022 hingga 2023 justru meningkat. Penyebab utama kematian ibu pada periode ini adalah eklampsia, sementara kematian bayi banyak disebabkan oleh kelahiran prematur.

Terdapat pemetaan visi-misi pemerintahan Prabowo yang menyebutkan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan. Akan tetapi, tidak ada indikator pencapaian yang jelas dan tidak ada penjelasan spesifik bagaimana perlindungan perempuan dilakukan. Ditambah, pendekatan kebijakan juga cenderung maskulin, sehingga kurang mempertimbangkan perspektif perempuan secara komprehensif. Anggaran program unggulan Prabowo di 100 hari pemerintahan paling banyak digelontorkan untuk MBG, yakni sebesar Rp71 T. Dana lain dialokasikan untuk perumahan terjangkau, dan ada berbagai inisiatif kesehatan, kendati belum

ada program prioritas untuk perempuan, kecuali MBG ibu hamil yang penyebarannya belum merata

Proporsi perempuan dalam pemerintahan Prabowo juga masih minim, hanya 10% dari total menteri dan 16% dari wakil menteri. Tidak ada perempuan dalam posisi koordinator yang mempertegas ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan strategis. Eksistensi perempuan dalam KemenPPPA juga cenderung lebih sebagai simbol kontinuitas daripada tanda perubahan struktural. Berdasarkan latar belakang yang ada, afiliasi menteri dan wakil menteri perempuan cukup banyak berasal dari kalangan non-partai/profesional yang beragam, mencerminkan preferensi terhadap teknokrasi. Dalam isu pemangkasan anggaran di K/L terkait perempuan, kesehatan, dan pendidikan, efisiensi belanja cukup banyak dipangkas, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kehilangan 62,85% anggarannya. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp7,2 T, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami efisiensi terbesar hingga mencapai 24,8%. Sektor kesehatan mengalami pemotongan hampir Rp19 T di Kementerian Kesehatan. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelayanan kesehatan dan pengawasan obat.

Gendis memperkaya pembahasan dengan penilaian dinamika dan proyeksi arah kebijakan Prabowo melalui pengarusutamaan gender (PUG). Program yang mempertimbangkan PUG memiliki dampak lebih besar karena berbasis pada data terpilah gender dan analisis kebutuhan spesifik perempuan, memastikan keadilan sosial dan inklusivitas, serta mendorong demokrasi yang lebih partisipatif. Hari ke-0 adalah titik mengukur kebijakan yang sudah berjalan dari pemerintahan sebelumnya dan yang dibawa oleh presiden saat ini dalam bentuk Asta Cita. Pada tahap ini, ada upaya untuk lebih responsif terhadap isu gender, tapi birokrasi yang ada masih kurang sensitif. Akibatnya, implementasi kebijakan berbasis gender belum maksimal. Pada hari ke-100 mengarah pada stagnasi kebijakan gender karena terdapat tanda-tanda pelemahan yang diakibatkan dari beberapa indikator, seperti alokasi anggaran yang berkurang dan semakin sedikitnya representasi perempuan di posisi strategis dalam pemerintahan. Terakhir, terdapat dua kemungkinan untuk proyeksi 2029. Jika reformasi birokrasi berjalan sesuai Asta Cita, maka terdapat peluang untuk bergerak ke arah pemerintahan yang lebih proaktif dalam menjalankan PUG. Akan tetapi, jika tidak ada perubahan signifikan, posisi akan tetap stagnan atau bahkan jatuh ke skenario di mana presiden memang memiliki kebijakan PUG, namun tetap dengan bias gender yang membatasi efektivitasnya. Pada akhirnya, Gendis memberikan

rekomendasi terkait pengimplementasian PUG dalam pemerintahan Prabowo. Beberapa rekomendasi tersebut berupa meningkatkan sistem pendukung bagi perempuan dalam kebijakan publik, mewujudkan keberlanjutan yang berorientasi pada dampak jangka panjang, mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan responsif gender.

## Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan 1: Dengan semua kritikan terhadap Kabinet "Keras Kepala dan Banyak Gengsi" ini, apakah ada strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil untuk mengembalikan akal sehat proses analisis penganggaran dan perencanaan? Apakah pemerintah sudah memikirkan akibat dari kebijakan-kebijakan yang tidak *sustainable* ini?

Jawaban: Mike, Salsabila, dan Gendis sepakat bahwa pemerintah sering kali menerapkan kebijakan tarik-ulur yang tidak berpihak pada masyarakat. Kebijakan ini bahkan menimbulkan dampak negatif, seperti kesenjangan sosial dan PHK massal. Mereka mencurigai bahwa kebijakan yang tidak berkelanjutan mungkin sengaja dibuat untuk memecah integrasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat sibuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga sulit bersatu dan bersuara. Ketiganya menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk kelompok perempuan, untuk terus bersuara dan memantau kebijakan. Mereka mendorong gerakan "no viral no justice" sebagai alat untuk menuntut keadilan. Selain itu, mereka menyarankan pemanfaatan media sosial dan jejaring strategis untuk mengadvokasi isu-isu publik. Edukasi dan pertukaran gagasan juga diperlukan agar masyarakat tidak terfragmentasi oleh politik yang memecah belah.

Pertanyaan 2: Pemerintah cenderung melakukan kebijakan praktis, apa kebijakan yang memenuhi *strategic gender interest* yang paling mungkin bisa dilakukan pemerintah dalam 5 tahun ke depan?

Jawaban: Mike, Salsabila, dan Gendis menekankan pentingnya kebijakan berkelanjutan dan inklusif gender, terutama dalam bantuan untuk ibu hamil, anak-anak, korban kekerasan, dan dampak PHK massal terhadap perempuan. Mike menyoroti bahwa layanan perempuan dan anak korban kekerasan perlu diperkuat dan dilanjutkan, bukan sekadar bantuan langsung. Salsabila menegaskan bahwa perspektif gender harus menjadi inti kebijakan, karena semua

sektor kebijakan berdampak pada perempuan dan kelompok marjinal. Gendis menambahkan bahwa pengarusutamaan gender harus melibatkan seluruh masyarakat, termasuk laki-laki dan kelompok sipil, serta memperkuat UU perlindungan hak perempuan. Mereka sepakat bahwa kebijakan ramah perempuan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pertanyaan 3: Terdapat alegasi gimik positif dengan pembebasan Mary Jane, warga negara Filipina, seorang buruh migran yang kemungkinan akan memiliki perlindungan BMI dengan skema bilateral melalui kerja sama antar kementerian. Bagaimana pandangan pemapar atas isu tersebut?

Jawaban: Salsabila, Mike, dan Gendis sepakat bahwa pembebasan Mary Jane, buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, meski terlihat sebagai langkah positif, harus dilihat secara kritis. Salsabila dan Mike berpendapat bahwa meskipun kasus ini dianggap seperti gimik positif, perlu ditinjau lagi apakah langkah struktural pemerintah di balik penyelesaian konflik sudah benar-benar memperhatikan keberpihakan dan jaminan perlindungan bagi buruh migran perempuan. Gendis menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar gimik politik, melainkan mencerminkan persoalan sistemik dalam perlindungan buruh migran, terutama perempuan yang sering menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salsabila menegaskan bahwa pemerintah perlu memperjelas status hukum Mary Jane dan memastikan perlindungan korban TPPO, bukan malah mengkriminalisasi mereka. Mike menambahkan bahwa kebijakan yang *smart* memerlukan internalisasi PUG dalam sistem kemasyarakatan, indikator yang jelas, serta peningkatan kapasitas diplomasi Kementerian Luar Negeri. Akhirnya, Gendis menyoroti bahwa isu buruh migran, di mana 80% adalah perempuan, harus menjadi bagian integral dari PUG dan memerlukan kebijakan sistemik yang berperspektif gender. Tanpa koordinasi antar sektor dan regulasi yang jelas, upaya seperti pembebasan Mary Jane hanya akan dianggap simbolis dan tidak menyelesaikan akar masalah, seperti eksploitasi buruh migran dan kurangnya perlindungan hukum yang adil.



Jalan Mabas Hankam No. T65,  
Bambu Apus, Cilangkap, 13890



Kamis, 06 Maret  
2025

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id